

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permintaan *auditing* bisa dipahami melalui kebutuhan akuntabilitas ketika pemilik bisnis mempekerjakan manajer untuk mengelola bisnis mereka seperti dalam perusahaan modern. Akuntansi dan *auditing* memainkan peran penting dalam hubungan prinsipal-agen. Karena tujuan manajer dan pemilik bisa jadi tidak sejalan, maka akan muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara dua pihak tersebut. Jika kedua belah pihak memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, maka manajer tidak selalu bertindak dalam kepentingan terbaik pemilik. Pada titik ini permintaan untuk *auditing* akan muncul (Messier dkk., 2014 : 6-7).

*Auditing* diminta karena *auditing* memainkan peran penting dalam memonitor hubungan kontrak antara entitas dan pemegang saham, manajer, pekerja, dan pemberi utang. Peran auditor adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disiapkan oleh manajer memenuhi ketentuan kontrak. Verifikasi auditor terhadap informasi keuangan akan menambah kredibilitas laporan dan mengurangi adanya risiko informasi atau risiko bahwa informasi yang dihasilkan oleh perusahaan akan salah atau menyesatkan (Messier dkk., 2014 : 7-8). Kompetensi orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Arens dkk., 2015 : 3).

Jika auditor tidak dapat memenuhi persyaratan independensi yang dinyatakan dalam Kode Perilaku Profesional, maka penolakan memberikan pendapat harus

dilakukan walaupun semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi tersebut telah dilaksanakan. Tidak adanya independensi akan mengesampingkan semua pembatasan ruang lingkup audit lainnya (Arens dkk., 2015 : 75). Tanggung jawab auditor untuk memberikan keyakinan yang memadai sehubungan dengan kesalahan, kecurangan, dan tindakan ilegal dengan jelas membentuk ruang lingkup pekerjaan auditor yang 'dia' lakukan (Messier dkk., 2014 : 44).

Standar audit tidak membedakan antara tanggung jawab auditor untuk mencari kekeliruan dan kecurangan. Auditor menemukan berbagai kesalahan atau kekeliruan yang berasal dari hal-hal seperti kesalahan kalkulasi, penghilangan, kesalahpahaman dan misaplikasi standar akuntansi, serta pengikhtisaran dan deskripsi yang tidak benar. Standar juga mengakui bahwa kecurangan sering kali lebih sulit dideteksi karena manajemen atau karyawan yang melakukan kecurangan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu. Namun, kesulitan mendeteksi kecurangan ini tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit secara layak guna mendeteksi salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau pun kecurangan (Arens dkk., 2015 : 173).

Sebagai kesimpulan, auditor independen bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Pada prinsipnya, salah saji akan dipandang material jika salah saji tersebut (baik secara individual maupun kolektif) mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh kepastian yang layak, tetapi tidak absolut, bahwa salah saji yang material dapat dideteksi (Hery, 2017 : 61).

Dampak potensial akibat keterbatasan bawaan suatu audit menjadi signifikan, khususnya dalam kasus salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. Risiko tidak terdeteksinya salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan adalah lebih tinggi dibanding risiko tidak terdeteksinya salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan. Hal ini disebabkan bahwa kecurangan seringkali melibatkan suatu skema yang terorganisir secara rapih dan cermat, yang memang dengan sengaja dirancang untuk menutupi kecurangan yang terjadi. Kolusi dapat menyebabkan auditor percaya bahwa bukti audit yang diperolehnya telah menyakinkan, walaupun pada kenyataannya bukti tersebut palsu (Hery, 2017 : 63-64).

Kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan tergantung pada kemahiran pelaku, frekuensi dan luasnya manipulasi, tingkat kolusi, dan senioritas individu yang terlibat (Hery, 2017 : 64). Jika auditor menduga bahwa manajemen terlibat dalam kecurangan, maka auditor harus mengkomunikasikan dugaan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan membahasnya dengan mereka tentang sifat, saat, dan luas prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan audit (Hery, 2017 : 222).

Sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kontek audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja (Arens dkk., 2015 : 396). Auditor harus tetap skeptis ketika mempertimbangkan sejumlah informasi, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan tersebut (Hery, 2017 : 204).

Ada dua jenis *fraud* yang utama, yaitu pelaporan keuangan yang menyesatkan (mengandung kecurangan) dan penyalahgunaan (perlakuan tidak semestinya) terhadap aset. Pelaporan keuangan yang menyesatkan merupakan kesalahan penyajian atau penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan secara sengaja dengan tujuan untuk menipu para pemakai laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan seringkali melibatkan pengabaian pengendalian oleh manajemen (Hery, 2017 : 197). Sementara itu, penyalahgunaan (perilaku tidak semestinya) terhadap aset adalah kecurangan yang menyangkut pencurian terhadap aset entitas. Penyalahgunaan aset sering kali disertai dengan pemalsuan catatan atau dokumen untuk menyembunyikan fakta bahwa aset tersebut telah hilang (dicuri) atau telah dijaminkan untuk kepentingan pribadi (Hery, 2017 : 199).

Standar *auditing* memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai risiko kecurangan. Auditor harus mempertahankan tingkat skeptisisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan (Arens dkk., 2015 : 402). Ini berarti, auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, tetapi kemungkinan mereka bersikap tidak jujur harus tetap dipertimbangkan. Demikian juga, auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya (Hery, 2017 : 63).

Bagaimana mungkin para auditor yang tugasnya melakukan pemeriksaan dan mencegah penyimpangan keuangan ternyata justru menerima suap dan terlibat penyimpangan keuangan? Salah seorang mantan auditor senior di BPK mengungkapkan jawaban bernada sarkastik, bahwa itu terjadi karena di antara auditor atau pemeriksa keuangan terdapat dua kategori : ‘auditor putih’ dan ‘auditor

hitam'. Auditor putih adalah mereka yang masih bekerja dengan nurani dan menjaga integritas dengan baik. Sedangkan auditor hitam adalah mereka yang menjadikan posisi pemeriksa sebagai komoditas dan mau menjualnya asalkan harganya cocok. Tapi tunggu dulu, apakah persoalan tentang jual-beli status LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) hanya bisa dijelaskan melalui sisi moralitas auditornya? Jangan-jangan fenomena auditor hitam adalah persoalan sistemik yang pemecahannya tidak sekadar sisi moralitas dan etika pejabatnya. Bisa jadi, ada banyak faktor yang membuat banyak auditor putih berubah menjadi auditor hitam dan faktor-faktor tersebut mungkin pengaruhnya sudah mengakar sekian lama dalam sistem akuntabilitas para auditor keuangan kita (Aditya, <http://www.krjogja.com> dengan *keyword* browser 'Auditor Hitam' atau link lengkap [http://www.krjogja.com/web/news/read/34456/Auditor\\_Hitam](http://www.krjogja.com/web/news/read/34456/Auditor_Hitam) diakses pada 4 Juni 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Mercellina Widiyastuti yang berjudul 'Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)'. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada fokus pendalaman materi dan objek penelitian studi kasus yang menjadi sumber data. Penelitian ini tidak mengikutsertakan tema kompetensi dan profesionalisme karena peneliti menganggap kedua tema tersebut sudah selayaknya menjadi bagian dari audit yang dikerjakan oleh auditor sebagai subjek penelitian. Kompetensi dan profesionalisme merupakan syarat mutlak seorang auditor untuk dapat melaksanakan suatu program audit sebagai faktor internal dari dalam diri auditor sendiri dalam mengaudit. Sementara independensi merupakan tema yang masih bisa diintervensi

pihak luar. Dengan dasar pemikiran tersebut, peneliti akan mencoba melaksanakan penelitian yang bersifat empiris pada sejumlah KAP di Wilayah Bandung Kota yang berfokus pada sikap independensi auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan judul penelitian **“Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Bandung Kota)”** sebagai pokok penelitian tugas akhir perkuliahan peneliti.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan?”

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bermaksud untuk :

“Menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan di penelitian empiris dengan subjek penelitian KAP yang berada di Wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.”

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

“Membuktikan secara empiris pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan dengan subjek KAP di Wilayah Kota Bandung.”

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan harapan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan pihak eksternal lainnya.

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai ada-tidaknya pengaruh antara independensi auditor terhadap upaya pendeteksian kecurangan dalam pengauditan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi KAP untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan dalam proses audit yang karena lemahnya sisi independensi auditor.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi KAP untuk mengevaluasi keahlian dan sikap profesional auditor serta peningkatan kualitas laporan keuangan yang di audit.

b. Bagi profesional pribadi auditor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk auditor terkait kemampuan profesionalnya yang dipengaruhi sikap independensi dalam hal memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan yang di audit dalam bentuk opini di laporan audit.

c. Bagi akademik perkuliahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan menambah wawasan mengenai apa saja yang melatarbelakangi sikap pendeteksian kecurangan dalam audit serta menjadi referensi bagi para penelitian berikutnya berkaitan dengan masalah independensi auditor dan pendeteksian kecurangan secara spesifik